

TESIS

**HARMONISASI DAN IMPLEMENTASI KEBIJAKAN
PENANGANAN PANDEMI COVID-19 DI
KABUPATEN GRESIK**



oleh

ASLUCHUL ALIF
NIM :092014453007

**PROGRAM STUDI MAGISTER
SAINS HUKUM PEMBANGUNAN
SEKOLAH PASCASARJANA
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2022**

TESIS

**HARMONISASI DAN IMPLEMENTASI KEBIJAKAN
PENANGANAN PANDEMI COVID-19 DI
KABUPATEN GRESIK**

oleh

**ASLUCHUL ALIF
NIM :092014453007**

**PROGRAM STUDI MAGISTER
SAINS HUKUM PEMBANGUNAN
SEKOLAH PASCASARJANA
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2022**

TESIS

**HARMONISASI DAN IMPLEMENTASI KEBIJAKAN
PENANGANAN PANDEMI COVID-19 DI
KABUPATEN GRESIK**

Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Magister
Dalam Program Studi Sains Hukum dan Pembangunan
Pada Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga

oleh

ASLUCHUL ALIF
NIM : 092014453007

**PROGRAM STUDI MAGISTER
SAINS HUKUM PEMBANGUNAN
SEKOLAH PASCASARJANA
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2022**

TESIS INI TELAH DISETUJUI
PADA TANGGAL 28 DESEMBER 2022

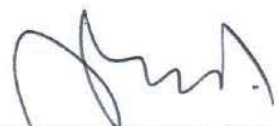
Oleh

Pembimbing Ketua



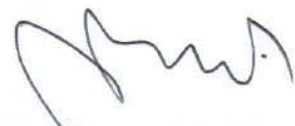
Dr. SUPARTO WICYO S.H., M.Hum
NIP.196810201998021001

Pembimbing Kedua



Dr. RADIAN SALMAN, S.H., LL.M.
NIP. 19771019200312100

Mengetahui,
Kooordinator Program Studi Program
Magister Sains Hukum Pembangunan



Dr. RADIAN SALMAN, S.H., LL.M.
NIP. 19771019200312100

Tesis diuji pada

Tanggal :22 Desember 2022

Panitia Penguji Tesis

- Ketua : 1. Dr. Prawitra Thalib, S.H.,M.H
- Anggota : 2. Dr. Suparto Wijoyo, S.H., M.Hum.
3. Dr. Radian Salman, S.H., LL.M.
4. Dr. Faizal Kurniawan, S.H., M.H., LL.M
5. Dr. Rr. Herini Siti Aisyah S.H.,M.H

PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ASLUCHUL ALIF
NIM : 092014453007
Program Studi : Magister Sains Hukum Pembangunan
Judul Tesis : Harmonisasi dan Implementasi Kebijakan Penanganan
Pandemi Covid-19 Di Kabupaten Gresik

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Tesis saya ini adalah asli (hasil karya sendiri) bukan merupakan hasil peniruan atau penjiplakan (Plagiarism) dari karya orang lain. Tesis ini belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik.

Dalam tesis ini tidak terdapat pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan didalam daftar pustaka. Demikian, pernyataan ini dibuat tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, apabila pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan norma dan peraturan yang berlaku di Universitas Airlangga.

Surabaya, 28 Desember 2022



ASLUCHUL ALIF
NIM :092014453007

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur Kehadirat Allah SWT atas karunia yang telah dilimpahkan sehingga penulis dapat melaksanakan penelitian dan menyelesaikan tesis dengan judul Harmonisasi dan Implementasi Kebijakan Penanganan Pandemi Covid-19 Di Kabupaten Gresik. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan dalam penulisan tesis ini diantaranya:

1. Prof. Badri Munir Sukoco, S.E., M.B.A., Ph.D, selaku Direktur Pasca Sarjana Universitas Airlangga dan segenap pengajar serta tenaga kependidikan Sekolah Pasca Sarjana Universitas Airlangga.
2. Dr. Suparto Wijoyo, S.H.,M.H selaku wakil Direktur II Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga dan juga pembimbing ketua.
3. Dr. Radian Salman, S.H.,LL.M selaku Koordinator Program Studi Magister Sains Hukum dan Pembangunan dan juga pembimbing kedua.
4. Dr. Prawitra Thalib, S.H.,M.H selaku ketua penguji.
5. Dr. Faisal Kurniawan, S.H., M.H., LL.M selaku anggota penguji.
6. Dr. Rr. Herini Siti Aisyah S.H.,M.H selaku anggota penguji.
7. Seluruh Dosen Program Studi Magister Sains Hukum dan Pembangunan yang telah berbagi ilmu dan memberikan pencerahan kepada penulis.
8. Seluruh Informan di Pemerintah Daerah Kabuparen Gresik dan Instansi terkait dalam penelitian ini;
9. Rekan seperjuangan Mahasiswa Magister Sains Hukum dan Pembangunan Universitas Airlangga dan seluruh keluarga besar Ikatan Alumni Universitas Airlangga.
10. Istri dan Anak-Anak saya yang selalu mendo'akan dan member dukungan dan juga Almarhum kedua orang tua saya yang menjadi inspirasi dan menyemangati dalam menyelesaikan penulisan tesis ini.

Semoga penelitian ini dapat memberikan kebermanfaatan seluas-luasnya baik secara akademis maupun dalam ranah praktis.

Surabaya, 28 Desember 2022

Penulis

RINGKASAN

HARMONISASI DAN IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENANGANAN PANDEMI COVID-19 DI KABUPATEN GRESIK

Asluchul Alif

Latar belakang penelitian ini adalah pespon multidimensi dari berbagai negara juga termasuk Indonesia dalam penanganan pandemi Covid-19 yang tidak hanya dalam dimensi kesehatan tapi juga dimensi sosial-ekonomi. Respon negara melalui berbagai regulasi terbagi atas penyelamatan kesehatandan perekonomian nasional melalui jaring pengaman sosial (*social safety net*), dan pemulihan perekonomian termasuk untuk dunia usaha dan masyarakat yang terdampak. Penelitian ini mengambil fokus jaring pengaman sosial (*social safety net*) dengan fokus(1) untuk menganalisa pengaturan kebijakan Jaring Pengaman Sosial (*social safety net*) dalam penanganan pandemi Covid-19 dari tingkat nasional dan daerah; (2) implementasi regulasi Jaring Pengaman Sosial (*social safety net*) dengan studi kasus di Kabupaten Gresik.

Manfaat penelitian secara teoritis diharapkan memperkaya kajian-kajian hukum dalam penanganan pandemi Covid-19 terutama pada dimensi pelaksanaan jaring pengaman sosial dan secara praktisdiharapkan memberikan sumbangsih bagi penyelenggaraaa pemerintah dan pemerintah Daerah untuk menjadi pembelajaran dalam perumusan regulasi penanganan pandemi.

Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah sosio-legal. Analisa hukum yang digunakan adalah *Regulatory Impact Analysis* (RIA) dan Metode *Rule, Opportunity, Capacity, Communication, Interest, Process, dan Ideology* (ROCCIPI). Jumlah informan dalam pelaksanaan interview dan focus group discussion sebanyak 19 Informan yang terlibat langsung dalam penyusunan regulasi maupun penyaluran regulasi Jaring pengaman Sosial Kabupaten Gresik meliputi perangkat Daerah teknis, Kecamatan, Narahubung Desa, dan Pelaksana Lapangan.

Hasil penelitian dijabarkan dalam 2 (dua) pokok pembahasan meliputi (1) Identifikasi Regulasi Pelaksanaan Jaring Pengaman Sosial (*Social Safety Net*) Dalam Penanganan Pandemi Covid-19; dan (2) Pelaksanaan Jaring Pengaman Sosial (*Social Safety Net*).

Kesimpulan penelitian menjawab rumusan masalah dimana Perumusan regulasi dan pelaksanaan Jaring Pengaman Sosial (*Social Safety Net*) di Kabupaten Gresik telah memperhatikan berbagai produk hukum. Selanjutnya berdasarkan analisa RIA dan ROCCIPI, regulasi tersebut telah memenuhi sebagian besar kaidah *good regulatory governance*.

Kata kunci :Jaring Pengaman Sosial, Harmonisasi, Implementasi

SUMMARY

**HARMONIZATION AND IMPLEMENTATION OF POLICIES FOR
HANDLING OF THE COVID-19 PANDEMIC IN THE GRESIK
REGENCY**

Asluchul Alif

The background of this research is the multidimensional response from various countries, including Indonesia, in handling the Covid-19 pandemic, not only in the health dimension but also in the socio-economic dimension. The state's response through various regulations divided into saving health and the national economy through a social safety net, and economic recovery, including for the business world and affected communities. This research focuses on social safety nets with a focus on (1) analyzing the regulation of social safety net policies in handling the Covid-19 pandemic from the national and regional levels; (2) implementation of social safety net regulations with case studies in Gresik Regency.

Theoretically, the research benefits expected to enrich legal studies in handling the Covid-19 pandemic, especially in the dimensions of implementing social safety nets and practically to contribute to government administration, which is becoming lessons learned in formulating regulations for handling pandemics.

The methodology used in this research is socio-legal. The legal analysis used is the Regulatory Impact Analysis (RIA) and the Rule, Opportunity, Capacity, Communication, Interest, Process, and Ideology (ROCCIPI) method. The number of informants in interviewing and focus group discussions was 19 informants who were directly involved in drafting regulations and distributing Gresik Regency Social Safety Net regulations, including regional technical apparatus, sub-districts, village contact persons, and field implementers.

It described the research results in 2 (two) main points of discussion, including (1) Identification of Regulations for Implementing Social Safety Nets in Handling the Covid-19 Pandemic; and (2) Implementation of the Social Safety Net.

The conclusion of the research answers the formulation of the problem where the formulation of regulations and implementing the Social Safety Net in the Gresik Regency has considered various legal products. Based on RIA and ROCCIPI analysis, these regulations have met most of the principles of good regulatory governance.

Keywords: Social Safety Net, Harmonization, Implementation

ABSTRAK

HARMONISASI DAN IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENANGANAN PANDEMI COVID-19 DI KABUPATEN GRESIK

Asluchul Alif

Permasalahan penanganan pandemi Covid-19 bukan hanya perihal kesehatan namun juga dampak ekonomi sosial yang massif. Berbagai respon kebijakan telah diterapkan oleh berbagai negara di Dunia sebagai respon global untuk mengatasi krisis Pandemi Covid-19 baik dalam kebijakan moneter, fiskal, kesehatan masyarakat, dan pengendalian manusia. Respon multidimensi dari berbagai negara juga diikuti oleh Indonesia dimana kasus Covid-19 pertama di Indonesia ditemukan pada 2 Maret tahun 2020 melalui Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid-19 dan Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019. Kebijakan Pemerintah Indonesia merupakan langkah-langkah luar biasa (*extraordinary*) di bidang keuangan negara dalam rangka penyelamatan kesehatan, dan perekonomian nasional, dengan fokus pada belanja untuk kesehatan, jaring pengaman sosial (*social safety net*), dan pemulihan perekonomian termasuk untuk dunia usaha dan masyarakat yang terdampak. Kebijakan ini dengan berbagai regulasi teknisnya secara selaras dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota termasuk Kabupaten Gresik.

Pendekatan dalam penelitian kebijakan penanganan pandemi Covid-19 dengan fokus penyaluran jaring pengaman sosial di Kabupaten Gresik adalah sosio-legal. Analisa hukum yang digunakan adalah *Regulatory Impact Analysis* (RIA) dan Metode *Rule, Opportunity, Capacity, Communication, Interest, Process, dan Ideology* (ROCCIPI) dengan 19 Informan yang terlibat langsung dalam penyusunan regulasi maupun penyaluran regulasi Jaring pengaman Sosial Kabupaten Gresik meliputi perangkat Daerah teknis, Kecamatan, Narahubung Desa, dan Pelaksana Lapangan.

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa perumusan regulasi dan pelaksanaan Jaring Pengaman Sosial (*Social Safety Net*) di Kabupaten Gresik telah memperhatikan berbagai produk hukum baik yang mengatur (*regeling*) dan juga produk hukum yang bersifat menetapkan atau penetapan *administratif* (*beschiking*) baik pada tataran nasional dan regional. Berdasarkan analisa *Regulatory Impact Analysis* (RIA), regulasi jaring pengaman sosial Kabupaten Gresik telah memenuhi prinsip *good regulatory governance* yaitu *Minimum Effective Regulation* dan *Competitive Neutrality*) tapi cenderung belum memenuhi prinsip *Transparency & Participation*). Berdasarkan model ROCCIPI, regulasi tersebut telah memenuhi kriteria *Rule, Opportunity, Capacity, Interest, Proces*, dan *Ideology* namun belum memenuhi kriteria *Communication*.

Kata kunci : Jaring Pengaman Sosial, Harmonisasi, Implementasi

ABSTRACT**HARMONIZATION AND IMPLEMENTATION OF POLICIES FOR
HANDLING OF THE COVID-19 PANDEMIC IN THE GRESIK
REGENCY**

Asluchul Alif

The problem of handling the Covid-19 pandemic is not only about health but also the massive social-economic impact. Various countries have implemented various policy responses in the world as a global response to overcoming the Covid-19 Pandemic crisis both in monetary, fiscal, public health, and human control policies. It also followed by Indonesia, where the first Indonesia Covid-19 case was on March 2, 2020 through the Establishment of the Covid-19 Public Health Emergency and State Financial Policy and Financial System Stability for Handling the Corona Virus Pandemic Disease 2019. The policies of the Government of Indonesia are extraordinary steps in state finances in saving health and the national economy, with a focus on spending on health, social safety net, and economic recovery, including for the world affected businesses and communities. The Provincial and Regency/City Governments implement this policy, with its various technical regulations, in harmony, including the Gresik Regency.

The approach in policy research on handling the Covid-19 pandemic with a focus on distributing social safety nets in the Gresik Regency is socio-legal. The legal analysis used is the Regulatory Impact Analysis (RIA) and the Rule, Opportunity, Capacity, Communication, Interest, Process, and Ideology (ROCCUPI) method. There were 19 informants who were directly involved in drafting the regulations and distributing the Gresik Regency Social Safety Net regulations including technical regional, sub-district, village liaison officers, and field implementers.

The research results show that the formulation of regulations and the implementation of the Social Safety Net in Gresik Regency have taken into account various legal products both regulating (regelling) and also legal products that are stipulating or administrative stipulations (beschiking) both at the national and regional levels. Based on the Regulatory Impact Analysis (RIA) analysis, the Gresik Regency's social safety net regulations have fulfilled the principles of good regulatory governance, namely Minimum Effective Regulation and Competitive Neutrality) but tend not to have fulfilled the principles of Transparency & Participation). Based on the ROCCUPI model, these regulations meet the Rule, Opportunity, Capacity, Interest, Process, and Ideology criteria but do not meet the Communication criteria.

Keywords: Social Safety Net, Harmonization, Implementation

DAFTAR ISI

Sampul Depan.....	i
Sampul Dalam.....	ii
Prasyarat Gelar.....	iii
Lembar Persetujuan	iv
Panitia Penguji Tesis	v
Lembar Orisinalitas	vi
Ucapan Terima Kasih.....	vii
Ringkasan	ix
Summary	x
Abstrak	xi
Abstract	xii
Daftar Isi	xiii
Daftar Gambar	xvi
Daftar Tabel	xvii
 BAB 1 PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Tujuan Penelitian.....	16
1.3 Manfaat Penelitian.....	17
1.4 Kajian Pustaka.....	19
1.4.1 Pandemi Covid-19.....	19
1.4.2 Jaring Pengaman Sosial (<i>Social Safety Net</i>).....	23
1.5 Metode Penelitian.....	29
1.5.1 Pendekatan Masalah.....	29
1.5.2 Sumber Bahan Hukum.....	30
1.5.3 Prosedur Pengumpulan Dan Analisa Bahan Hukum.....	31
1.6 Pertanggungjawaban Sistematika.....	33
 BAB 2 IDENTIFIKASI REGULASI PELAKSANAAN JARING PENGAMAN SOSIAL (<i>SOCIAL SAFETY NET</i>) DALAM PENANGANAN PANDEMI COVID-19	
2.1 Regulasi Pengaturan Pelaksanaan Jaring Pengaman Sosial Dalam Penanganan Pandemi Covid-19 Di Tingkat Nasional....	37
2.1.1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular.....	37
2.1.2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1991 Tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular.....	40
2.1.3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan....	41
2.1.4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Keekarantinaan Kesehatan.....	45

2.1.5.	Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang.....	47
2.1.6.	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan <i>Corona Vrus Disease</i> 2019 (Covid-19).....	57
2.1.7.	Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).....	58
2.1.8.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 Tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, Dan Penggunaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.....	60
2.2	Keterkaitan Regulasi Pengaturan Pelaksanaan Jaring Pengaman Sosial dalam Penanganan Pandemi Covid-19 di Tingkat Nasional.....	65
2.3	Regulasi Penetapan Pelaksanaan Jaring Pengaman Sosial Dalam Penanganan Pandemi Covid-19 Di Tingkat Nasional...	75
2.3.1	Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor Hk.01.07/Menkes/104/2020 Tentang Penetapan Infeksi Novel Coronavirus (Infeksi 2019-NCov) Sebagai Penyakit Yang Dapat Menimbulkan Wabah Dan Upaya Penanggulangannya Dan Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 9.A Tahun 2020 Tentang Penetapan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona Di Indonesia.....	75
2.3.2	Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan <i>Corona Virus Disease</i> 2019 (Covid- 19) Diubah Dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 Selanjutnya Dicaput Dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 108	

	Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 Tentang Komite Penanganan <i>Corona Virus Disease</i> 2019 (Covid- 19) Dan Pemulihan Ekonomi Nasional.....	76
2.3.3	Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Penetapan Kedarup.Atan Kesehatan Masyarakat <i>Corona Virus Disease</i> 2019 (Covid- 19).....	80
2.3.4	Inmendagri Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Penyediaan Dan Percepatan Penyaluran Bantuan Sosial Dan/Atau Jaring Pengaman Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.....	81
2.4	Keterkaitan Regulasi Penetapan Pelaksanaan Jaring Pengaman Sosial dalam Penanganan Pandemi Covid-19 Di Tingkat Nasional.....	82
2.5	Regulasi Pengaturan Pelaksanaan Jaring Pengaman Sosial Dalam Penanganan Pandemi Covid-19 Di Tingkat Jawa Timur Dan Kabupaten Gresik.....	84
2.5.1	Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan <i>Corona Virus Disease</i> 2019 (Covid-19)	84
2.5.2	Peraturan Bupati Gresik Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan <i>Corona Virus Disease</i> 2019 (Covid-19) Di Kabupaten Gresik.....	85
2.5.3	Peraturan Bupati Gresik Nomor 19 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gresik Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Jaring Pengaman Sosial, Stimulan Ekonomi, Dan Bantuan Langsung Tunai Desa Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Kabupaten Gresik.....	86
2.5.4	Keputusan Bupati Gresik Nomor: 188/290/Hk/437.12/2020 Tentang Status Keadaan Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat <i>Corona Virus Disease</i> 2019 (Covid-19).....	88
2.5.5	Keputusan Bupati Gresik Nomor: 188/290/Hk/437.12/2020 Tentang Status Keadaan Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat <i>Corona Virus Disease</i> 2019 (Covid-19).....	88
2.5.6	Keputusan Gubernur Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar	89
2.6	Keterkaitan Regulasi Pengaturan Dan Penetapan Pelaksanaan Jaring Pengaman Sosial Dalam Penanganan Pandemi Covid-19 di Tingkat Jawa Timur Dan Kabupaten Gresik.....	93

BAB 3	PELAKSANAAN JARING PENGAMAN SOSIAL (SOCIAL SAFETY NET) DALAM PENANGANAN PANDEMI COVID-19 DI KABUPATEN GRESIK	
3.1	Perkembangan Pandemi Covid-19 dan Kondisi Kemiskinan di Kabupaten Gresik.....	101
3.1.1	Perkembangan Kemiskinan di Kabupaten Gresik Sebelum dan Pasca Pandemi Covid-19.....	101
3.1.2	Fenomena Pandemi Covid-19 di Kabupaten Gresik.....	116
3.2	Analisa Implementasi Regulasi Penyaluran Jaring Pengaman Sosial (<i>Social Safety Net</i>) di Kabupaten Gresik.....	120
3.2.1	Implementasi Regulasi Jaring Pengaman Sosial (<i>Social Safety Net</i>) Di Kabupaten Gresik.....	120
3.2.2	Analisa Pembentukan Regulasi Jaring Pengaman Sosial (<i>Social Safety Net</i>) Di Kabupaten Gresik.....	134
BAB 4	PENUTUP	
4.1	Kesimpulan.....	166
4.2	Saran.....	168

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1.	Tingkat Kemiskinan Kabupaten Gresik Tahun 201-2021....	15
Gambar 1.2	Struktur Genom Virus.....	19
Gambar 2.1	Flowchart Keterkaitan Regulasi dalam Pelaksanan Jaring Pengaman Sosial (<i>Social Safety Net</i>) Pandemi Covid-19....	98
Gambar 3.1	Peta Administrasi Kabupaten Gresik.....	102
Gambar 3.2	Piramida Penduduk Kabupaten Gresik.....	106
Gambar 3.3	Komposisi Penduduk Kabupaten Gresik Menurut Generasi.	107
Gambar 3.4	Tingkat Kemiskinan dan Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Gresik Tahun 2011 – 2021.....	109
Gambar 3.5	Posisi Relatif Tingkat Kabupaten Gresik terhadap Jawa Timur dan Nasional Tahun 2011 – 2021.....	110
Gambar 3.6	Komposisi Desil DTKS Kabupaten Gresik Tahun 2020...	113
Gambar 3.7	Komposisi Desil DTKS Kabupaten Gresik Tahun 2021...	114
Gambar 3.8	Kasus Harian Covid-19 Indonesia Tahun 2020-2022.....	117
Gambar 3.9	Kasus Total Covid-19 Indonesia Tahun 2020-2022.....	118
Gambar 3.10	Penyebaran Covid-19 di Kabupaten Gresik pada masa Gelombang I (Agustus 2020 s.d Februari 2021), II (Mei s.d. Agustus 2021) dan III (Januari-Maret 2022).....	119

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Respon Multidimensi Penanganan Covid-19 di Berbagai Negara.....	4
Tabel 1.2	Respon Kebijakan Moneter Bank Central di berbagai Negara...	26
Tabel 1.3	Sistematika Penulisan Penelitian.....	33
Tabel 2.1	Ketentuan Pengaturan Cakupan dan Tindakan Karantina dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.....	47
Tabel 2.2	Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Covid-19.....	48
Tabel 2.3	Pelaksanaan PSBB di wilayah Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, dan Kabupaten Gresik.....	89
Tabel 2.4	Identifikasi Regulasi Jaring Pengaman Sosial Nasional dan Daerah yang Berpengaruh terhadap implementasi dan permusan regulasi Jaring Pengaman Sosial di Kabupaten Gresik.....	90
Tabel 3.1	Perkembangan Jumlah Penduduk Kabupaten Gresik Tahun 2017 – 2021.....	104
Tabel 3.2	Masa Pelaksanaan PSBB Kabupaten Gresik pada Gelombang I Pandemi.....	123
Tabel 3.3	Standar Operasional Prosedur dalam Mekanisme pengelolaan dan penetapan data penerima manfaat Jaring Pengaman Sosial Kabupaten Gresik.....	130
Tabel 3.4	Penyaluran Jaring Pengaman Sosial Kabupaten Gresik.....	132
Tabel 3.5	Garis Kemiskinan Kabupaten Gresik dan Provinsi Jawa Timur Tahun 2016-2020.....	134
Tabel 3.6	Daftar Informan Model <i>Regulatory Impact Analysis</i> (RIA) Regulasi Penyaluran Jaring Pengaman Sosial Kabupaten Gresik.....	138
Tabel 3.7	Daftar Pernyataan Model <i>Regulatory Impact Analysis</i> (RIA) Regulasi Penyaluran Jaring Pengaman Sosial Kabupaten Gresik.....	140
Tabel 3.8	Hasil Model <i>Regulatory Impact Analysis</i> (RIA) Regulasi Penyaluran Jaring Pengaman Sosial Kabupaten Gresik.....	145